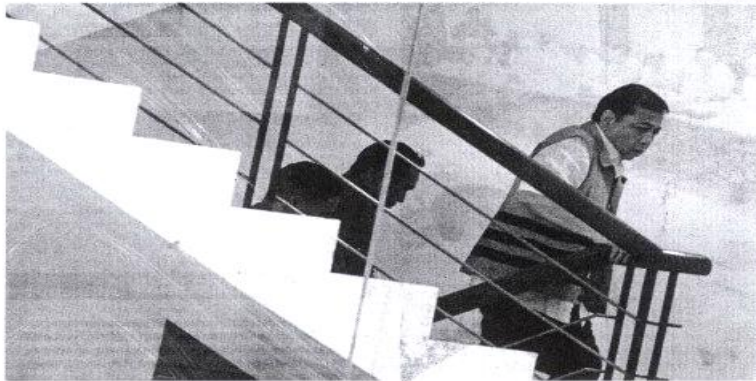


Judul : Sejumlah Partai Desak MKD Sidangkan Setya Novanto
Tanggal : Rabu, 29 November 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5



Ketua DPR Setya Novanto di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sejumlah Partai Desak MKD Sidangkan Setya Novanto

Mahkamah tak perlu mengadakan rapat konsultasi dengan pemimpin fraksi.

Maya Ayu Puspitasari
maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah pemimpin partai politik mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) untuk memprioritaskan penanganan dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto. Para pemimpin partai menyatakan kelambanan MKD dalam memproses kasus etik ketua DPR justru membuat buruk citra lembaga legislatif.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, misalnya, mendesak MKD agar cepat bekerja. Ia menduga kelambanan MKD dipicu surat yang dikirimkan Setya dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 November lalu. Dalam surat tersebut, Setya meminta pemimpin Dewan tak menggelar rapat pleno dan rapat MKD untuk membahas pencopotan dirinya.

Meski ada surat dari Setya, menurut Baidowi, MKD semestinya tetap menggelar rapat. "MKD membuat posisi DPR kian sulit di hadapan publik," kata Baidowi di Jakarta,

Kami sayangkan MKD yang lambat dalam kasus ini. Sikap MKD ini membuat institusi DPR semakin sulit di hadapan publik. Kami meminta MKD bersifat profesional. Ini bagian dari kritik internal demi marwah lembaga DPR.

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL PPP
ACHMAD BAIDOWI

kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Setya sebagai tersangka kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Ketua Umum Partai Golkar ini diduga terlibat kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun—dari nilai total proyek Rp 5,84 triliun—itu.

Selasa pekan lalu, MKD telah mengadakan rapat konsultasi dengan pemimpin fraksi. Ketua MKD Suifmi Dasco menyatakan rapat konsultasi diperlukan karena menyangkut posisi pemimpin DPR. Namun rapat itu batal karena empat fraksi absen: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. "MKD perlu masukan fraksi-fraksi," kata Suifmi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan Setya sebaiknya mundur dari jabatan Ketua DPR. MKD, menurut Zulkifli, tak bisa didesak untuk melengserkan Setya jika Golkar belum menentukan pengantinya. "Bagus kalau Pak Novanto mundur. Bagus buat Novanto, DPR, dan

buat Golkar," kata dia. Senada dengan Zulkifli, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan kasus Setya memalukan Dewan. Ia meminta MKD segera menyidangkan kasus tersebut. "Tak semua anggota Dewan beringsek. Ia harus diganti," kata dia.

Desakan juga datang dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy. Menurut dia, MKD bisa langsung menggelar rapat tanpa harus berkonsultasi dulu kepada pemimpin fraksi. Sebab, MKD beranggotakan semua unsur fraksi. "Kalau MKD tak segera rapat, berarti tak responsif terhadap suara masyarakat," kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate melontarkan hal senada. "MKD bisa menentukan sikap melalui ketua kelompok fraksi di internal mahkamah," kata dia.

Dorongan agar MKD menyidangkan dugaan pelanggaran etik Setya juga datang luar gedung DPR. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, misalnya, telah memasukkan laporan dugaan pelanggaran etik oleh Setya ke MKD.

Mereka Ingin Mahkamah Segera Bergerak

MAYORITAS pemimpin partai politik mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat segera mengambil sikap terhadap laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Berikut ini sikap sejumlah partai.



KETUA UMUM PAN ZULKIFLI HASAN

"Saya sudah meminta sejak awal, Pak Novanto mundur. Itu baik untuk Pak Novanto, baik untuk DPR, dan baik untuk Golkar."



SEKRETARIS JENDERAL NASDEM
JOHNNY G. PLATE

"Fraksi NasDem akan selalu siap jika dibutuhkan untuk rapat. Sebagai anggota kehormatan Dewan setingkat komisi dan badan, MKD tidak harus konsultasi dengan fraksi. Cukup melalui ketua kelompok fraksi di MKD."



WAKIL KETUA UMUM DEMOKRAT ROY SURIYO

"Lebih baik MKD segera bersikap, apalagi sudah banyak permintaan dari masyarakat."



KETUA HARIAN GOLKAR NURDIN HALID

"Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu putusan praperadilan."

● MAYA AYU PUSPITASARI